



ADMINISTRASI TRADISIONAL SEBAGAI BASIS PEMBENTUKAN IDENTITAS KOLEKTIF PADA MASYARAKAT ADAT GEBONG MEMARONG DI BANGKA BELITUNG

Dewi Shinta¹, Waldimer Pasaribu^{2*}, Irwan³

^{1,2*,3}Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung,
Pangkalpinang, Indonesia

Email: ¹sintadewirahayu711@gmail.com, ^{2*}pasaribuwaldimer@yahoo.com,

³irwan777@ubb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi tradisional dalam membentuk dan mempertahankan identitas kolektif masyarakat adat Gebong Memarong di Kabupaten Bangka. Di tengah tantangan modernisasi, kajian terdahulu cenderung berfokus pada konflik agraria dan pengakuan hukum, namun masih terdapat celah penelitian mengenai peran administrasi tradisional sebagai basis reproduksi identitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi tradisional bukan sekadar mekanisme pengaturan sosial, melainkan instrumen utama integrasi sosial melalui sistem musyawarah, kepemimpinan adat, dan ritual budaya. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, administrasi tradisional menjalankan fungsi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (AGIL) secara terintegrasi untuk menjaga resiliensi komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan institusi lokal menjadi kunci dalam menegosiasikan identitas budaya di tengah arus birokrasi modern. Implikasi akademis penelitian ini memperkaya diskursus sosiologi mengenai resiliensi institusi tradisional, sedangkan secara praktis memberikan landasan bagi kebijakan perlindungan masyarakat adat melalui pengakuan sistem tata kelola lokal.

Kata Kunci: Administrasi Tradisional, Identitas Kolektif, Masyarakat Adat, Gebong Memarong

ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of traditional administration in shaping and maintaining the collective identity of the Gebong Memarong indigenous community in Bangka Regency. Amidst the challenges of modernization, previous studies have predominantly focused on agrarian conflicts and legal recognition, leaving a research gap regarding the role of traditional administration as a basis for identity reproduction. Employing a qualitative approach with ethnographic methods, data were collected through participant observation and in-depth interviews, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that traditional administration is not merely a social regulation mechanism but a primary instrument for social integration through customary deliberation, leadership, and cultural rituals. From Talcott Parsons' structural-functionalist perspective, traditional administration performs the integrated functions of *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, and *Latency* (AGIL) to maintain community resilience. These findings emphasize that strengthening local institutions is key to negotiating cultural identity amidst modern bureaucratic pressures. Academically,*

this study enriches sociological discourse on the resilience of traditional institutions, while practically providing a foundation for indigenous protection policies through the recognition of local governance systems.

Keywords: *Traditional Administration, Collective Identity, Indigenous Community, Gebong Memarong*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dengan keberadaan berbagai komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem sosial, nilai, dan tata Kelola tradisional sebagai bagian dari identitas mereka. Salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting, tetapi belum banyak menjadi perhatian dalam kajian administrasi publik modern, adalah administrasi tradisional yang berkembang di lingkungan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat, administrasi tradisional tidak hanya berfungsi mengatur kehidupan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, memperkuat kohesi sosial serta menjaga keberlanjutan identitas budaya di Tengah perubahan zaman [1]. Administrasi ini mencakup mekanisme pengaturan sarana pelestarian nilai, norma, hingga pembentukan identitas kolektif yang membedakan satu komunitas dengan kelompok lainnya [2].

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komunitas adat tertua di Pulau Bangka, yaitu masyarakat Mapur atau dikenal sebagai Urang Lom. Masyarakat ini bermukim di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, dengan karakteristik budaya yang tercermin dalam sistem sosial dan ritual adat yang khas [3]. Salah satu simbol eksistensi mereka adalah Kampung Adat Gebong Memarong, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas budaya sekaligus ruang sosial tempat praktik administrasi tradisional dijalankan secara konsisten. Meskipun arus modernisasi mulai merambah wilayah ini, lembaga adat Urang Lom tetap konsisten memberikan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakatnya [4]. "Secara komparatif, sistem administrasi tradisional masyarakat Mapur memiliki karakteristik resiliensi yang berbeda jika disandingkan dengan komunitas adat lain di Indonesia yang telah banyak dikaji. Sebagai contoh, masyarakat Baduy di Banten menerapkan sistem tata kelola yang bersifat tertutup dan isolatif melalui prinsip *Pikukuh* untuk menjaga kemurnian adat dari pengaruh eksternal [22]. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Ammatoa Kajang memusatkan administrasi adatnya pada regulasi ekosentrisme melalui praktik *Pasang ri Kajang* yang secara ketat mengatur hubungan manusia dengan hutan keramat [5]. Sementara itu, masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat menggunakan keseragaman arsitektur dan pola spasial sebagai instrumen utama dalam mempertahankan kohesi sosial [6]. Berbeda dengan model-model tersebut, administrasi tradisional Mapur di Gebong Memarong menunjukkan mekanisme yang lebih adaptif namun tetap rigid dalam reproduksi nilai. Keunikan Mapur terletak pada pemanfaatan ruang sosial-simbolik (Memarong) sebagai pusat sirkulasi pengetahuan dan negosiasi identitas di tengah kepungan industri ekstraktif timah dan ekspansi perkebunan sawit yang masif di wilayah Bangka [7]. Perbandingan ini menegaskan bahwa administrasi tradisional Mapur tidak sekadar berfungsi sebagai penjaga tradisi, melainkan sebagai mesin sosiologis yang aktif melakukan negosiasi budaya di wilayah lingkaran industri, sebuah aspek yang masih jarang dieksplorasi dalam studi sosiologi masyarakat adat."

Pentingnya administrasi tradisional terletak pada fungsinya yang melampaui sekadar pengaturan birokratis lokal; ia adalah bentuk *indigenous governance* yang memiliki legitimasi kuat dari komunitasnya [8]. Administrasi tradisional juga menjadi sarana reproduksi budaya yang memungkinkan nilai, norma, dan praktik sosial adat diwariskan secara berkelanjutan. "Meskipun literatur mengenai tata kelola masyarakat adat di Indonesia telah mapan dalam mendiskusikan aspek legal-formal dan konflik agrarian [9], terdapat ketimpangan literatur (*literature imbalance*) dalam memandang administrasi tradisional sebagai sistem fungsional yang aktif melakukan reproduksi identitas pada masyarakat yang terdampak industri ekstraktif. Kebanyakan studi sebelumnya terjebak pada pandangan statis bahwa administrasi adat hanyalah peninggalan masa lalu (*legacy*), bukan sebagai instrumen dinamis yang menjalankan fungsi *Integration* dan *Latency* di tengah transisi generasi dan penetrasi budaya digital." Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek pengakuan hukum masyarakat adat, konflik sumber daya, maupun perlindungan hak-hak adat, penelitian ini menempatkan administrasi tradisional sebagai basis pembentukan dan pemeliharaan identitas kolektif masyarakat adat Gebong Memarong. Fokus ini memberikan perspektif baru dalam kajian sosiologi masyarakat adat dengan menunjukkan bahwa administrasi tradisional tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tata kelola lokal, tetapi juga sebagai arena reproduksi nilai budaya, penguatan solidaritas sosial, dan keberlanjutan identitas kolektif di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual mengenai hubungan antara tata kelola adat, reproduksi budaya, dan resiliensi identitas masyarakat adat.

Urgensi penelitian ini meningkat seiring dengan tantangan penetrasi budaya luar yang berpotensi melonggarkan ikatan kohesi sosial generasi muda terhadap [7]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana administrasi tradisional menjalankan fungsi reproduksi budaya dan mempertahankan identitas kolektif masyarakat adat Gebong Memarong. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka sistem sosial Talcott Parsons untuk membedah bagaimana fungsi *Integration* dan *Latency* bekerja dalam institusi adat. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi budaya dan sosiologi masyarakat adat dengan menunjukkan bagaimana administrasi tradisional berperan dalam mempertahankan identitas kolektif dan keberlanjutan nilai – nilai budaya di tengah perubahan sosial akibat modernisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai makna sosial, nilai budaya, serta praktik administrasi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Gebong Memarong [10]. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami sekaligus menginterpretasikan pengalaman dan perspektif informan terhadap berbagai fenomena sosial budaya yang menjadi fokus penelitian [11]. Metode etnografi digunakan karena sesuai untuk mengkaji kehidupan masyarakat yang memiliki sistem nilai, norma, dan praktik budaya yang khas. Keterlibatan peneliti melalui pengamatan partisipatif memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap Tindakan sosial, simbol budaya, dan praktik-praktik yang dipertahankan oleh masyarakat adat Gebong Memarong [12].

"Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Gebong Memarong, Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kabupaten Bangka. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan episentrum budaya masyarakat adat Mapur yang hingga kini masih mempertahankan praktik administrasi tradisional secara konsisten. Validitas data etnografis dalam penelitian ini diperkuat melalui durasi kerja lapangan (*fieldwork*) yang intensif selama enam bulan (Januari hingga Juni 2026). Selama periode tersebut, peneliti melakukan keterlibatan mendalam (*immersion*) dengan menetap secara periodik di lingkungan pemukiman Gebong Memarong. Hal ini dilakukan untuk membangun *rapport* yang kuat dengan informan kunci serta memastikan peneliti dapat mengobservasi secara langsung siklus kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas harian di ladang, proses pengambilan keputusan dalam musyawarah adat, hingga pelaksanaan ritual besar. Durasi ini dianggap memadai untuk mencapai kejenuhan data (*data saturation*) dan memahami kompleksitas makna di balik perilaku sosial yang tersembunyi (*tacit knowledge*) yang tidak mungkin didapatkan melalui kunjungan singkat [13] [14]."

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik administrasi tradisional yang menjadi fokus penelitian [11]. Informan penelitian terdiri atas Ketua Adat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuda adat, dan masyarakat umum yang aktif terlibat dalam kegiatan adat. Pemilihan informan berlangsung hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh mulai menunjukkan pola berulang dan tidak ditemukan lagi data baru yang signifikan [15]. Rincian kategori dan kriteria informan disajikan pada Tabel 1.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai tiga Teknik utama untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai administrasi tradisional masyarakat adat. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung berbagai aktivitas masyarakat, seperti musyawarah adat, pelaksanaan ritual budaya, kegiatan gotong royong, serta interaksi sosial sehari-hari [16]. Dalam proses observasi, peneliti menerapkan perpaduan peran sebagai *complete observer* sekaligus *observer as participant*. Melalui pendekatan tersebut peneliti tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga ikut berinteraksi dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk ritual *Neratap* dan juga *Setapak Miring*. Keterlibatan yang berlangsung selama enam bulan ini memungkinkan peneliti membangun pemahaman sebagai bagian dari komunitas secara metodologis, sehingga data yang lebih autentik sesuai karakter penelitian etnografi [17]. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai perilaku, nilai, dan praktik sosial yang mungkin sulit diungkapkan melalui wawancara [18]. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai administrasi tradisional, mekanisme pengambilan keputusan adat, kepemimpinan, hubungan kekerabatan, serta proses pembentukan identitas kolektif dari perspektif informan [19]. Dokumen tertulis maupun visual dimanfaatkan sebagai sumber data pendukung, meliputi arsip kelembagaan adat, dokumen pemerintah desa, foto kegiatan adat, catatan Sejarah komunitas, serta berbagai sumber tertulis mengenai masyarakat adat Mapur. Seluruh dokumen tersebut dianalisis untuk menguatkan hasil observasi dan wawancara [11] [15].

Dalam peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam penelitian ini bertanggung jawab mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data secara langsung di lapangan [20]. Posisi peneliti adalah sebagai *observer as participant*, yaitu terlibat aktif dalam aktivitas masyarakat untuk memperoleh pemahaman mendalam tanpa mengubah situasi sosial secara artifisial [16].

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi (*conclusion drawing and verification*) [15]. Tahap kondensasi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data agar sesuai dengan fokus penelitian. melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data sesuai fokus penelitian. Data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik sebelum dilakukan proses penarikan Kesimpulan melalui verifikasi secara berulang.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan Teknik Triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) dan *member checking*. Kredibilitas data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Informasi yang diperoleh dari setiap informan dibandingkan dengan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan pada waktu berbeda sehingga konsistensi temuan dapat dipastikan [20] [18]. *Member checking* melibatkan informan untuk meninjau kembali interpretasi peneliti, memastikan kesesuaian antara temuan dan pengalaman mereka [20]. Penerapan etika penelitian juga sangat diperhatikan, termasuk memperoleh persetujuan informan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas, menghormati nilai budaya masyarakat adat, dan memastikan data hanya digunakan untuk kepentingan akademik [21].

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Informan	Peran dalam Komunitas
I - 1	Ketua Adat Gebong Memarong	Pemimpin adat dan mengambil keputusan adat
I – 2	Tokoh Adat Senior	Penjaga nilai dan tradisi adat
I – 3	Kepala Dusun Air Abik	Penghubung administrasi formal dan adat
I – 4	Tokoh Masyarakat	Pelaku aktif kegiatan Sosial adat
I – 5	Pemuda Adat	Generasi penerus adat
I – 6	Masyarakat Adat	Peserta musyawarah dan ritual adat, Pelaksana kegiatan gotong royong, Pewaris nilai budaya keluarga

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi tradisional pada masyarakat Gebong Memarong bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan manifestasi empiris dari sistem sosial yang stabil dan terintegrasi. Secara spasial, kompleks pemukiman adat yang terkonsentrasi (sebagaimana terlihat pada Gambar 1a) mencerminkan fungsi *Adaptation* (A), dalam administrasi tradisional Gebong Memarong tidak hanya berhenti pada penataan ruang fisik, melainkan mencakup strategi bertahan hidup di tengah kepungan industri ekstraktif. Secara ekonomi, administrasi adat mengatur sistem pemanfaatan lahan melalui skema *Ladang Berpindah* yang disinkronkan dengan kalender adat. Di tengah tekanan ekspansi tambang timah dan sawit, lembaga adat berfungsi sebagai

pemutus kebijakan kolektif untuk menolak konversi lahan ulayat menjadi area pertambangan, guna menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang [22]. Secara simultan, adaptasi juga dilakukan terhadap penetrasi budaya digital. Administrasi tradisional tidak lagi dipandang sebagai sistem kuno yang kedap teknologi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Ketua Adat dan pemuda adat memanfaatkan platform *WhatsApp Group* sebagai media koordinasi 'birokrasi adat' yang cepat, mulai dari menggerakkan warga untuk ritual hingga konsolidasi menghadapi pihak luar. Penggunaan media sosial untuk mendokumentasikan visualitas Kampung Adat merupakan strategi adaptasi untuk membangun *brand identity* masyarakat Mapur di mata publik, yang berfungsi sebagai perisai politik agar keberadaan mereka diakui secara legal-formal oleh negara [23] [24]." Di dalam ruang-ruang fisik tersebut, aktivitas administrasi dijalankan melalui interaksi sosial yang intensif, seperti musyawarah dan konsultasi adat (lihat Gambar 1b). Proses ini menjalankan fungsi *Integration* (I) dan *Goal Attainment* (G), di mana konsensus dicapai untuk meminimalkan konflik internal sekaligus menetapkan arah kebijakan komunitas demi kesejahteraan bersama. Lebih jauh lagi, institusi adat yang secara formal teridentifikasi melalui Lembaga Adat Mapur (Gambar 1c) berperan sebagai penjaga fungsi *Latency* (L), yaitu pemeliharaan pola-pola budaya dan nilai leluhur agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Sinergi keempat fungsi ini dalam arena administrasi tradisional secara simultan memperkuat identitas kolektif masyarakat Mapur, menjadikan institusi lokal tersebut sebagai benteng resiliensi budaya yang melegitimasi eksistensi mereka di tengah masyarakat luas. Fungsi *Latency* (pemeliharaan pola) dijalankan secara sakral melalui ritual *Neratap* dan *Setapak Miring*. Ritual *Neratap*, yang secara harfiah berarti memasang atap rumbia pada rumah Memarong, bukan sekadar aktivitas fisik. Dalam prosesi ini, seluruh anggota komunitas berkumpul; orang tua memberikan instruksi teknis kepada anak muda mengenai cara mengikat simpul rotan yang kuat. Simbol 'Atap' di sini dimaknai sebagai perlindungan nilai-nilai leluhur yang harus tetap utuh meskipun cuaca zaman berganti. Di sela-sela pemasangan atap, terjadi transmisi nilai *kelulutan* (kebersamaan) melalui penuturan lisan sejarah asal-usul Urang Lom. Sementara itu, ritual *Setapak Miring* dilakukan dengan berjalan bersama melintasi batas-batas kampung. Simbol 'Jejak Langkah' dalam ritual ini mengajarkan generasi muda bahwa identitas mereka terikat pada tanah ulayat. Dalam setiap perhentian, pemuka adat membacakan doa-doa kuno yang mengandung kode etik berperilaku dalam alam (manusia-alam-pencipta). Melalui deskripsi ini, terlihat bahwa administrasi tradisional melalui ritual berfungsi sebagai instrumen sosialisasi primer yang menanamkan nilai-nilai laten ke dalam sanubari generasi muda, sehingga pola budaya tetap terjaga meskipun arus modernitas digital sangat kuat [25] [26]."

"Model konseptual pada Gambar 2 menggambarkan alur sirkular resiliensi masyarakat adat. Alur ini dimulai dari Administrasi Tradisional sebagai input sistem yang menyediakan aturan main. Mekanisme Musyawarah dan Kepemimpinan menjadi proses pengolahan (throughput), di mana konflik kepentingan diredam dan konsensus dibangun. Output dari proses ini adalah Reproduksi Nilai (melalui ritual tadi) yang secara langsung mengkristal menjadi Identitas Kolektif.

Korelasi utuhnya terletak pada hubungan antara praktik Gotong Royong sebagai mesin penggerak solidaritas sosial; tanpa administrasi yang mengatur gotong royong, identitas kolektif akan rapuh. Gambar 2 menegaskan bahwa

keberlanjutan masyarakat Mapur bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja sistemik administrasi tradisional yang terus-menerus menghubungkan masa lalu (tradisi) dengan masa kini (modernitas) melalui fungsi AGIL yang saling berinteraksi [27]."



Gambar 1. Arena dan Praktik Administrasi Tradisional di Gebong Memarong:
(a) Lanskap Kompleks Adat; (b) Proses Musyawarah dan Wawancara Mendalam; (c) Identitas Formal Lembaga Adat Mapur.

Administrasi Tradisional sebagai Mekanisme Integrasi Sosial

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa administrasi tradisional tetap menempati posisi sentral sebagai dasar pengelolaan kehidupan sosial masyarakat Gebong Memarong. Pelaksanaan administrasi tradisional diwujudkan melalui forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga dalam menentukan berbagai Keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Ketua Adat Gebong Memarong menjelaskan:

"Kalau ada persoalan di kampung, kami selalu menyelesaikannya melalui musyawarah adat terlebih dahulu. Semua warga boleh menyampaikan pendapatnya karena keputusan harus menjadi keputusan bersama." (I-1, wawancara, Februari 2026).

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah adat tidak sekadar menjadi sarana pengambilan Keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai media yang memperkuat solidaritas sosial di dalam komunitas. Proses musyawarah mendorong terbentuknya kesepahaman bersama mengenai nilai, norma, dan aturan adat yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Keterlibatan seluruh anggota komunitas dalam proses tersebut menciptakan rasa memiliki terhadap setiap Keputusan yang dihasilkan sehingga solidaritas sosial dapat terus dipelihara.

Partisipasi aktif masyarakat juga menumbuhkan tanggung jawab kolektif untuk mempertahankan keteraturan sosial sekaligus menjaga hubungan antaranggota komunitas berdasarkan nilai-nilai musyawarah yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut memperlihatkan bekerjanya fungsi *Integration* dalam skema AGIL Talcott Parsons AGIL framework, yaitu kemampuan suatu sistem sosial membangun keteraturan melalui partisipasi dan kesepakatan bersama [25]. Berbeda dengan mekanisme birokrasi formal yang cenderung bersifat hierarkis, integrasi sosial di Gebong Memarong dibangun melalui proses deliberatif yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi sosial dalam masyarakat adat tidak semata-mata dibangun melalui kepatuhan terhadap norma, tetapi juga melalui keterlibatan aktif anggota komunitas dalam proses musyawarah yang

menghasilkan keputusan bersama. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara individu dengan komunitas dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Dengan mekanisme tersebut, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan Keputusan yang diterima sebagai kesepakatan bersama. Situasi tersebut menunjukkan bahwa administrasi tradisional berfungsi sebagai instrument yang menjaga stabilitas hubungan sosial sekaligus memperkuat kohesi masyarakat di tengah berbagai perubahan sosial.

Kepemimpinan Adat sebagai Sumber Legitimasi Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur administrasi tradisional masyarakat Gebong Memarong. Otoritas tokoh adat tidak berasal dari prosedur administrative formal, melainkan dibangun melalui pengakuan masyarakat atas integritas, pengalaman, dan penguasaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Seorang tokoh masyarakat menyatakan:

"Masyarakat masih sangat menghormati keputusan tokoh adat karena dianggap memahami aturan leluhur dan tahu bagaimana menjaga keseimbangan hidup masyarakat." (I-4, wawancara, Februari 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, kepemimpinan adat mencerminkan fungsi *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) dalam kerangka AGIL Parsons, di mana tokoh adat berperan mengarahkan masyarakat menuju tujuan bersama sekaligus menjaga keberlangsungan nilai budaya. Otoritas ini bersifat tradisional, di mana kekuasaan diperoleh melalui kepercayaan masyarakat terhadap adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun – temurun [28]. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat menjadi modal sosial yang memungkinkan penyelesaian berbagai persoalan melalui mediasi, pemeliharaan harmoni sosial, dan pelestarian nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi tradisional tetap relevan karena mampu memberikan kepastian sosial yang tidak selalu bisa disediakan oleh administrasi negara modern. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan adat berfungsi sebagai pengikat kehidupan sosial yang membantu menjaga keberlangsungan norma dan nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berinteraksi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan adat berperan penting dalam menjaga kesinambungan kehidupan sosial karena tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai pengambilan Keputusan, tetapi juga sebagai penjaga nilai, norma, dan tradisi masyarakat

Reproduksi Budaya melalui Kekerabatan dan Ritual (Fungsi *Latency*)

Dalam masyarakat Gebong Memarong, hubungan kekerabatan tidak hanya didasarkan pada pertalian darah, tetapi juga menjadi dasar pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial.:

"Kami diajarkan sejak kecil bahwa semua orang di kampung ini adalah keluarga. Karena itu kalau ada yang mengalami kesulitan, kami harus membantu." (I-6, wawancara, Maret 2026).

Penanaman nilai gotong royong berlangsung sejak lingkungan keluarga sehingga keluarga berperan sebagai media utama pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. [29]. Selain itu, praktik adat seperti ritual *Neratap* dan *Setapak Miring* berfungsi sebagai media pewarisan nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda. Keikutsertaan generasi muda dalam ritual tersebut tidak hanya memperkenalkan tradisi leluhur, tetapi juga membantu mereka memahami nilai budaya yang membentuk identitas komunitas. Seorang tokoh adat menjelaskan bahwa melalui ritual tersebut, generasi muda belajar menghormati leluhur dan memahami aturan adat. Keterlibatan dalam berbagai ritual adat, generasi muda memperoleh kesempatan untuk memahami makna budaya yang diwariskan secara turun-temurun serta posisi mereka sebagai bagian dari komunitas adat. Dalam kerangka AGIL, fenomena ini mencerminkan fungsi *Latency* (pemeliharaan pola), dimana sistem sosial memastikan bahwa pola-pola budaya tetap terjaga dan diwariskan ke generasi berikutnya [25].

Nilai adat yang diwariskan tetap dipelihara, namun penerapannya menyesuaikan perkembangan kehidupan generasi muda tanpa menghilangkan makna dasarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ritual adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga kesinambungan pengetahuan, nilai, dan identitas kolektif masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembentukan Identitas Kolektif di Tengah Modernisasi

Proses pembentukan identitas kolektif masyarakat berlangsung melalui praktik administrasi tradisional yang dijalankan secara berkesinambungan. Berbagai simbol budaya, seperti Rumah Adat Memarong, kegiatan gotong royong, dan musyawarah adat, memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap komunitasnya (*sense of belonging*) yang kuat. Seorang pemuda adat mengungkapkan:

"Kalau ikut kegiatan adat, kami merasa menjadi bagian dari masyarakat Mapur. Di situlah kami belajar siapa diri kami." (I-5, wawancara, Maret 2026).

Ungkapan "belajar siapa diri kami" menunjukkan bahwa identitas kolektif adalah hasil dari interaksi sosial yang rutin dalam praktik administrasi adat [25]. Proses tersebut menunjukkan bahwa identitas kolektif tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya yang berlangsung secara berkelanjutan.

Kehadiran modernisasi dan perkembangan teknologi tidak sepenuhnya ditolak oleh masyarakat, melainkan direspons secara selektif sesuai kebutuhan komunitas.. Mereka melakukan negosiasi identitas melalui fungsi *Adaptation* (adaptasi), yaitu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman (seperti penggunaan media sosial untuk koordinasi adat) tanpa kehilangan prinsip dasar adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi tidak selalu berakhir pada melemahnya tradisi, tetapi justru menjadi bagian dari strategi masyarakat adat dalam mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai budaya di Tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dengan demikian, modernisasi tidak selalu dipahami sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai proses yang mendorong masyarakat untuk menyesuaikan praktik-praktik sosialnya tanpa melepaskan nilai-nilai budaya yang dianggap penting. Identitas kolektif yang terbentuk melalui praktik

administrasi tradisional tidak bersifat statis, melainkan terus dipelihara dan direproduksi melalui keterlibatan Masyarakat dalam berbagai aktivitas adat yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa identitas kolektif tidak hanya dibangun melalui kesamaan asal-usul budaya, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menjalankan berbagai praktik adat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberlangsungan masyarakat adat tidak semata-mata ditopang oleh eksistensi lembaga adat, tetapi juga oleh kemampuan administrasi tradisional dalam mempertahankan nilai budaya melalui praktik sosial yang terus dijalankan. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberlangsungan masyarakat adat tidak semata-mata ditopang oleh eksistensi lembaga adat, tetapi juga oleh kemampuan administrasi tradisional dalam mempertahankan nilai budaya melalui praktik sosial yang terus dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi tradisional pada masyarakat Gebong Memarong bekerja melalui keterhubungan berbagai unsur sosial dan budaya yang saling mendukung. Musyawarah adat berfungsi membangun integrasi sosial dan kesepahaman bersama, sementara kepemimpinan adat memberikan legitimasi dan arah dalam kehidupan komunitas. Di sisi lain, sistem kekerabatan, ritual budaya, dan praktik gotong royong berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya serta memperkuat identitas kolektif masyarakat. Keterkaitan berbagai unsur tersebut membentuk suatu mekanisme sosial yang memungkinkan pada masyarakat adat mempertahankan keberlangsungan budaya dan kehidupan sosialnya seiring perubahan zaman.

Model Konseptual Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara administrasi tradisional dan keberlanjutan masyarakat adat dapat dipetakan dalam model berikut:



Gambar 2. Model Konseptual Keberlanjutan Identitas melalui Administrasi Tradisional

Model konseptual ini menunjukkan bahwa administrasi tradisional berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara praktik-praktik sosial adat dengan keberlanjutan identitas kolektif masyarakat. Proses tersebut berlangsung melalui tahapan yang saling terhubungan, mulai dari musyawarah adat, kepemimpinan adat, system kekerabatan, ritual budaya, hingga praktik gotong royong yang secara kolektif membentuk ruang reproduksi nilai dan norma budaya adat. Seluruh proses ini pada akhirnya memperkuat identitas kolektif masyarakat Mapur (Lom), yang kemudian berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial serta legitimasi kelembagaan adat. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi dasar utama dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat di Tengah dinamika modernisasi.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa administrasi tradisional pada masyarakat Gebong Memarong bukan sekadar mekanisme teknis pengaturan sosial, melainkan sebuah institusi strategis yang mereproduksi dan mempertahankan identitas kolektif. Melalui praktik musyawarah adat, kepemimpinan tokoh adat, hubungan kekerabatan, dan pelaksanaan ritual budaya, administrasi tradisional berperan membangun kesadaran kolektif, mereproduksi nilai budaya, serta memperkuat kohesi sosial antaranggota komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan identitas masyarakat adat sangat bergantung pada konsistensi institusi administrasi lokal dalam menjalankan fungsinya di tengah tekanan modernisasi. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kebaruan konseptual dengan membuktikan bahwa sistem sosial tradisional tidak secara niscaya mengalami disintegrasi atau 'hancur' akibat penetrasi modernitas, melainkan mampu bertindak sebagai subjek dinamis yang melakukan negosiasi aktif melalui institusi lokalnya. Masyarakat adat Gebong Memarong mendemonstrasikan bahwa dengan mengoptimalkan fungsi *Integration* dan *Latency* pada administrasi tradisional, komunitas adat dapat mentransformasi tantangan industri dan digital menjadi instrumen penguat identitas kolektif, sekaligus mematahkan paradigma deterministik yang memandang tradisi akan selalu tunduk pada perubahan zaman."

Melalui lensa fungsionalisme struktural, penelitian ini memperkaya pemahaman melalui perspektif fungsionalisme structural Talcott Parsons, dengan menunjukkan bahwa fungsi *Integration* (integrasi) dan *Latency* (pemeliharaan pola) menjadi unsur yang paling menentukan dalam menjaga stabilitas sistem sosial masyarakat adat. Proses pembentukan identitas kolektif masyarakat berlangsung melalui praktik administrasi tradisional yang dijalankan secara berkesinambungan. Temuan ini memperlihatkan bahwa administrasi tradisional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tata kelola lokal, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi budaya yang secara aktif mewariskan nilai budaya sekaligus memperkuat identitas kolektif masyarakat adat di tengah perubahan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya memperkuat legitimasi kelembagaan adat sekaligus mendokumentasikan pengetahuan lokal sebagai upaya preventif terhadap pengikisan identitas budaya akibat arus globalisasi.

Penelitian masih memiliki keterbatasan karena ruang lingkupnya hanya mencakup satu komunitas adat, yaitu masyarakat Gebong Memarong di Pulau Bangka. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian komparatif antara berbagai komunitas adat di Indonesia guna

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika administrasi tradisional dan resiliensi identitas kolektif dalam skala yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. A. A. e. al., "Indigenous Participation and the Incorporation of Indigenous Knowledge and Perspectives in Global Environmental Governance Forums: A Systematic Review," *Environmental Management*, Amerika Serikat: Springer, 2023.
- [2] A. Melucci, "The Process of Collective Identity," dalam *Social Movements and Culture*, Eds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995., 1995.
- [3] O. H. Smedal, *Order and Difference: An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*. Oslo: University of Oslo, 1989, Oslo: University of Oslo, 1989.
- [4] R. R. d. R. A. Agustian, "Urgensi pembentukan lembaga adat Urang Lom guna memberikan perlindungan suku Lom, Bangka: PROGRESIF: Jurnal Hukum, vol. 15, no. 2, pp. 176–192, 2020.
- [5] M. & S. N. Akib, *Local Wisdom of Ammatoa Kajang Indigenous Community in Forest Conservation*, Kajang: *Journal of Social Studies Education Research*, 11(3), 123-140, 2020.
- [6] H. Hermawan, *Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga dalam Pelestarian Lingkungan sebagai Sumber Belajar Sosiologi*, Jawa Barat: *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(10), 1-12., 2018.
- [7] P. P. S. d. N. H. B. Darmawan, "Tergerusnya kearifan lokal orang Mapur di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit PT. GPL di Dusun Air Abik, Kabupaten Bangka, Bangka: *Academy of Education Journal*, vol. 15, no. 1, pp. 121–135, 2024, 2024.
- [8] A. J. Karso, "Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia," *Makasar: Frontiers in Political Science*, vol. 7, p. 1601480, 2025., 2025.
- [9] A. Nazriansyah, "Pemetaan partisipatif sebagai gerakan sosial pengakuan masyarakat hukum adat (studi kasus pada masyarakat adat suku Mapur Bangka), Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2025.
- [10] J. W. C. d. J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: J. W. Creswell dan J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. California: Sage Publications, 2018.
- [11] M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, California: Sage Publications, 2015.
- [12] J. P. Spradley, *Participant Observation*, Illinois: J. P. Spradley, *Participant Observation*. Illinois: Waveland Press, 2016.
- [13] D. M. Fetterman, *Ethnography: Step-by-Step* (4th ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2019.
- [14] M. & A. P. Hammersley, Hammersley, M., & Atkinson, P. (2019). *Ethnography: Principles in Practice*. London: Routledge., London: Routledge.: London: Routledge., 2019.

- [15] A. M. H. d. J. S. M. B. Miles, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd, California: Sage Publications, 2014.
- [16] K. M. D. d. B. R. DeWalt, *Participant Observation: A Guide for Fieldworkers.*, Amerika Serikat: Maryland: Rowman & Littlefield, 2011.
- [17] H. F. Wolcott, *The Art of Fieldwork*. Walnut Creek,, Walnut Creek: CA: AltaMira Press, 2005.
- [18] N. K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods.*, London: Routledge: London: Routledge, 2017.
- [19] S. K. d. S. Brinkmann, *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, 3rd, California: Sage Publications: California: Sage Publications, 2015.
- [20] Y. S. L. d. E. G. Guba, *Naturalistic Inquiry.*, California: Sage Publications: California: Sage Publications, 1985..
- [21] M. I. d. I. Hay, *Research Ethics for Social Scientists*, California: Sage Publications: California: Sage Publications, 2006.
- [22] M. R. Dove, *The Anthropology of Development and Sustainability: From Market Economy to Tribal Society*, London: Routledge: London: Routledge, 2015.
- [23] M. Castells, *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture.*, Oxford: Wiley-Blackwell: Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
- [24] J. Postill, *Localizing the Internet: An Anthropological Account*, Oxford: Berghahn Books: Oxford: Berghahn Books, 2011.
- [25] T. Parsons, *The Social System.*, New York: Free Press, 1951.
- [26] C. Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays.*, New York: Basic Books: New York: Basic Books., 1973.
- [27] J. C. Alexander, *The Functional Reconstruction of Theory: Talcott Parsons Revisited*, Cambridge University Press: Cambridge University Press, 2014.
- [28] M. Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, vol. 2, California: California: University of California Press, , 1978.
- [29] P. Bourdieu, "Outline of a Theory of Practice," dalam *The New Social Theory Reader*, London: Routledge: London: Routledge, 2020.